



Pelatihan dan
Sertifikasi Kompetensi

KEPATUHAN

berbasis

ISO 37301



www.crmsindonesia.org

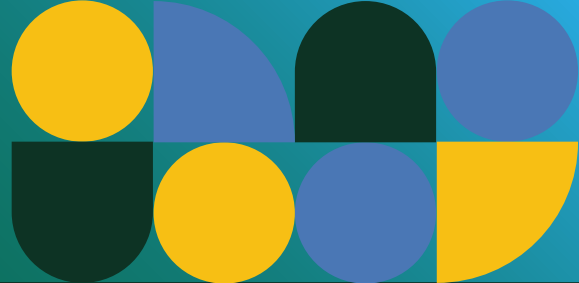


Lisensi:

Bekerja sama dengan:



LATAR BELAKANG PROGRAM PROFESI | OKUPASI | KOMPETENSI



Keberadaan dan kontribusi profesional bidang kepatuhan semakin dibutuhkan pada tingkatan yang lebih intens dan terstandarisasi.

Keberadaan profesional bidang kepatuhan menjadi keharusan pada sektor industri jasa keuangan, terutama perbankan dan asuransi. Selain itu, sejalan dengan era revolusi industri 4.0, tren kebutuhan terhadap profesional bidang kepatuhan di sektor lain juga meningkat tajam seiring dengan kebutuhan organisasi untuk melakukan praktik manajemen kepatuhan secara efektif bersama-sama dengan praktik tata kelola dan manajemen risiko.

Tuntutan praktik sistem manajemen kepatuhan bagi organisasi sudah menjadi agenda global, ditandai dengan kehadiran standar ISO 19600 sebagai 'International Standard of Compliance Management' yang diluncurkan pada tahun 2014. Pada tahun 2021, ISO 19500 digantikan oleh ISO 37301 'Compliance management systems — Requirements with guidance for use'

Agar organisasi dapat menerapkan sistem manajemen kepatuhan secara efektif, diperlukan praktisi dengan kompetensi yang terstandarisasi. Menjawab kebutuhan tersebut, Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI) mengembangkan (Standar Kompetensi Kerja) SKK Khusus bidang kepatuhan yang merujuk pada ISO 37301.

Proses sertifikasi terhadap ketiga skema di atas dijalankan secara independen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi / Person (LSP) Mitra Kalyana Sejahtera (disingkat LSP MKS) yang telah menerapkan sistem manajemen ISO 17024 dan kaidah rujukan (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) BNSP. Untuk itu CRMS bekerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan persiapan sertifikasi tersebut.

MANFAAT SERTIFIKASI

INDIVIDU | ORGANISASI | KOMUNITAS



Bagi individu pengambil sertifikasi kompetensi:

- Membuka peluang berkarir di bidang kepatuhan.
- Membuka peluang berkarir di lingkungan internasional.
- Lebih bernilai tambah bagi organisasi.
- Memiliki faktor pembeda unggulan.
- Masuk dalam komunitas profesi bidang kepatuhan.
- Memiliki kompetensi yang sedang dalam tren kebutuhan di banyak industri.



Bagi organisasi pengguna lulusan sertifikasi:

- Efektif dalam pembangunan budaya kepatuhan organisasi.
- Mendukung integrasi tata kelola dan manajemen risiko dengan kepatuhan.
- Rekognisi penggunaan standar internasional.
- Konsistensi pengembangan dan penelusuran kompetensi karyawan.
- Lebih tangguh menghadapi dinamika industri dan regulasi.
- Lebih proaktif terhadap dampak perubahan regulasi.



Bagi komunitas:

- Bertambahnya praktisi manajemen kepatuhan yang memiliki kompetensi terstandarisasi.
- Mendukung praktik tata kelola yang baik: korporasi dan publik.
- Hak pemangku kepentingan lebih terjaga.
- Terciptanya komunitas patuh hukum yang lebih intens.
- Keterlibatan komunitas dalam pembangunan budaya patuh hukum.
- Memperkuat ketahanan masyarakat madani.

MANAJEMEN KEPATUHAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.

ISO 37001 (G) | ISO 31000 (R) | ISO 37301 (C)

ISO 37301: Compliance management systems merupakan standar internasional sistem manajemen kepatuhan yang dikeluarkan oleh ISO (International Organization for Standardization) pada tahun 2021, menggantikan ISO 19600. Dalam ISO 37301, menetapkan persyaratan dan memberikan pedoman untuk menetapkan, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam suatu organisasi. Selain itu ISO juga mengeluarkan standar terkait anti penyuapan yaitu ISO 37001.

ISO 37001: Anti-Bribery Management System telah diadopsi identik oleh Indonesia pada bulan November tahun 2017 dimana proses dalam ISO 37001 sejalan dan sebangun dengan **Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2016** tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dalam praktik, pelaksanaan ISO 37001 maupun ISO 37301 dijalankan bersandingan dengan ISO 31000: Manajemen Risiko, untuk membentuk integrasi praktik tata kelola, manajemen risiko dan Kepatuhan yang dikenal dengan **GRC (Governance, Risk Management and Compliance)**.



PRAKTIK DAN RUJUKAN MANAJEMEN KEPATUHAN DI INDONESIA INDUSTRI JASA KEUANGAN | SEKTOR PUBLIK | SEKTOR SWASTA

Pada industri jasa keuangan, saat ini terdapat POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang mengharuskan adanya fungsi dan okupasi kepatuhan yang tertuang pada POJK Nomor 46 /POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. Sementara itu, sektor lain memulai praktik manajemen kepatuhan secara umum dalam rangka pemenuhan tuntutan pemangku kepentingan mereka, terutama di industri minyak dan gas, pertambangan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Beberapa regulasi terkait dengan kepatuhan yang berlaku secara umum, di antaranya adalah:

- **Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016** tentang tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- **Peraturan MA No. 13 Tahun 2016** mengenai penanganan perkara pidana korporasi.

Tiga skema sertifikasi kompetensi bidang kepatuhan LSP MKS:



CERTIFIED COMPLIANCE OVERSIGHT PROFESSIONAL (CCOP)

Skema ini dirancang bagi para profesional yang memiliki kompetensi lintas okupasi dalam bidang manajemen kepatuhan dan memiliki fungsi dalam pengawasan pelaksanaan manajemen kepatuhan organisasi. Umumnya mereka berperan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota komite di organisasi perusahaan.



CERTIFIED CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCCO)

Skema ini dirancang bagi para profesional yang memiliki okupasi sebagai penanggung jawab atau akuntabel terhadap pelaksanaan manajemen kepatuhan di organisasi. Umumnya mereka adalah anggota direksi dan manajemen puncak di organisasi perusahaan, dan eselon 1 dan 2 di sektor publik.



CERTIFIED COMPLIANCE PROFESIONAL (CCP)

Skema ini dirancang bagi profesional yang memiliki okupasi sebagai pelaksana manajemen kepatuhan di tingkatan manajerial baik yang sedang berkarya di organisasi korporasi maupun di sektor publik dan nirlaba.

TENTANG CRMS



CRMS (Center for Risk Management & Sustainability, sebelumnya Center for Risk Management Studies) adalah organisasi pendidikan yang memiliki visi memfasilitasi akselerasi praktik tata kelola (Governance), manajemen risiko (Risk Management), kepatuhan (Compliance), dan Keberlanjutan (Sustainability) di Indonesia melalui pengembangan keilmuan dan inisiatif untuk berbagi ke masyarakat luas.

Sejak tahun 2010, CRMS telah berkolaborasi dengan berbagai organisasi dalam menyelenggarakan program edukasi bagi para profesional baik manajemen risiko ataupun secara umum di bidang GRCS (Governance, Risk Management, Compliance, and Sustainability), dan menyediakan kesempatan untuk memperluas kapasitas serta mempertajam kapabilitas profesional mereka.

TENTANG LSP MKS



Pada awal pendiriannya, LSP MKS memulai program sertifikasi pada bidang manajemen risiko serta bidang tata kelola yang saat ini telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17024 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). SNI ISO/IEC 17024 merupakan rujukan standar internasional bagi Lembaga Sertifikasi Person.

SNI ISO/IEC 17024 merupakan rujukan standar internasional bagi Lembaga Sertifikasi Person (LSP). Saat ini KAN telah memiliki perjanjian *Multilateral Recognition Agreement* (MRA) dengan *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC) mengenai standar Lembaga Sertifikasi Person ISO/IEC 17024 sehingga kompetensi Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi KAN dapat diakui keberterimaannya secara global.

Sampai dengan Bulan Agustus 2019, pemegang sertifikat kompetensi dari LSP MKS sudah berjumlah lebih dari 2.365 orang dan terus bertambah seiring dengan naiknya kebutuhan kompetensi bidang manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000 di berbagai sektor, dan diluncurkannya sertifikasi kompetensi bidang tata kelola berbasis SKK KNKG, serta dimulainya persiapan sertifikasi kompetensi kepatuhan berbasis ISO 37301

TENTANG INSTITUTE OF COMPLIANCE PROFESSIONAL INDONESIA (ICoPI).



Institute of Compliance Professional Indonesia atau disingkat ICoPI adalah wadah atau perhimpunan bagi para profesional bidang kepatuhan yang dibentuk dalam rangka membantu praktisi dan profesional kepatuhan di Indonesia untuk secara berkesinambungan memperoleh peningkatan pemahaman, kompetensi dan kemahiran sehingga dapat memberikan nilai tambah baik bagi organisasi dimana mereka berkarya, maupun bagi para profesional itu sendiri dalam upaya memperoleh pengakuan kesetaraan keahlian secara regional dan global. ICoPI didirikan pada tanggal 7 Mei 2018, sesuai keputusan Menteri Hukum dan **HAM RI** no. **AHU-0006259.AH.01.07.TAHUN 2018**.





Misi

Memfasilitasi akselerasi praktik Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Keberlangsungan di Indonesia melalui pengembangan keilmuan dan inisiatif untuk berbagi ke masyarakat luas.



Aktivitas

Sebagai pusat edukasi yang memfasilitasi berbagai kegiatan serta inisiatif dalam rangka berbagi keilmuan Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Keberlangsungan baik untuk komunitas praktisi maupun akademisi.

Kontak:

Jl Batununggal Asri No. 18
Bandung 40267, Indonesia

Phone: (+62)22 8730 1035

Mobile: (+62)811 22 333 075

Email: secretariat@crmsindonesia.org

www.crmsindonesia.org